

**TELAAH KRITIS TERHADAP PROGRAM BINA DESA HUTAN :
Penyuluhan Pertanian Sawah di Desa Tanjung Paku, Kecamatan Seruyan
Hulu, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah**

Oleh : Pudji Muljono *)

Pendahuluan

Pembangunan masyarakat dalam arti luas adalah perubahan sosial yang terencana untuk meningkatkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat secara umum, baik dari segi budaya, ekonomi, sosial politik, maupun agama. Strategi dan perangkat kebijakan ekonomi makro yang telah dilaksanakan selama Pemerintahan Orde Baru yang didasarkan atas pendekatan neoklasik ternyata telah menimbulkan masalah-masalah ekonomi nasional, antara lain kemiskinan struktural, pengangguran terbuka dan terselubung, serta kesenjangan distribusi pendapatan dan kekayaan (Budiman, 1997). Salah satu sisi negatif dari konsep pembangunan dalam arti pertumbuhan ekonomi adalah kemungkinan terjadinya pertumbuhan ekonomi tanpa didukung oleh perubahan sosial, sehingga pada suatu saat terjadi stagnasi. Tanpa adanya dukungan perubahan sosial, pertumbuhan ekonomi dapat membawa dampak negatif terhadap bidang sosial.

Berkaitan dengan kebijakan pembangunan dalam bidang kehutanan, terutama terkait dengan pembinaan masyarakat desa hutan, secara sistematis Nugraha (2004) menyatakan bahwa kelemahan-kelemahan mendasar program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) setidaknya merefleksikan 5 hal pokok, yaitu : (1) data studi diagnostik tidak mencerminkan penerapan metode partisipatif sehingga data yang dihasilkan lebih banyak berupa data sekunder, (2) jenis-jenis kegiatan tidak mencerminkan dan melibatkan partisipasi masyarakat desa yang bersangkutan, (3) jenis-jenis kegiatan secara umum tidak bertumpu pada pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam setempat, (4) kegiatan PMDH tidak diarahkan untuk mengembangkan dan menguatkan pranata sosial ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, dan (5) kegiatan tidak dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pembangunan desa lainnya.

Salah satu masalah klasik yang harus diatasi oleh Departemen Kehutanan dan perusahaan pemegang konsesi perusahaan hutan menyangkut keberadaan masyarakat desa hutan adalah upaya untuk mengendalikan aktivitas perladangan berpindah. Dari segi demografis, menurut data FAO populasi masyarakat peladang yang ada di Indonesia berjumlah lebih kurang 12 juta jiwa dengan areal ladang seluas 35 juta hektar. Sementara menurut BPS, jumlah manusia Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sistem pertanian ladang sebanyak 5,6 juta jiwa dengan luas areal sebesar 10,4 juta hektar (Nugraha, 2005).

Sementara itu dari sisi lain, menurut kacamata komersial-ekonomis pemerintah dan perusahaan pemegang konsesi perusahaan hutan kegiatan ladang berpindah merupakan kegiatan yang rendah produktivitasnya, boros sumber daya alam, dan tidak ramah lingkungan. Adanya program bina desa hutan yang salah satu kegiatannya mengacu pada upaya pengembangan sistem pertanian lahan basah,

semakin memperkuat legitimasi komunitas perusahaan pemegang konsesi pengusahaan hutan untuk mengalihkan sistem pertanian masyarakat setempat, dari pertanian ladang berpindah menjadi pertanian menetap atau pertanian sawah.

Pola pendekatan perencanaan yang bersifat topdown, terpusat dan seragam menyebabkan hampir setiap program bina desa hutan selalu merekomendasikan kegiatan pertanian menetap. Tanpa melihat kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta potensi fisik wilayah desa binaan. Artikel ini menyajikan telaah kritis terhadap program bina desa hutan tersebut, terutama yang terjadi pada program intensifikasi pertanian sawah di desa Tanjung Paku, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambaran Umum Desa Tanjung Paku

Desa Tanjung Paku merupakan sebuah wilayah yang sempurna untuk menggambarkan proses perubahan sosial masyarakat desa hutan. Secara administrasi pemerintahannya berada di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua provinsi tersebut secara regional tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari sumber daya hutan yang melimpah.

Masyarakat Tanjung Paku merupakan bagian dari masyarakat desa hutan yang berasal dari suku bangsa Dayak yang tinggal di Kalimantan. Merunut sejarahnya, kakek moyang suku bangsa dayak berasal dari daratan Asia. Mereka telah tinggal di Kalimantan beberapa ribu tahun sebelum masehi. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Kalimantan, mereka tidak lagi hidup dalam zaman batu, tetapi telah mengenal alat yang terbuat dari tanah, besi maupun kuningan.

Aspek Historis

Nama Desa Tanjung Paku diambil dari lokasi desa yang menjorok ke sungai Seruyan menyerupai bentuk semenanjung. Di tengah-tengah semenanjung tersebut banyak ditumbuhi tanaman paku (pakis), sehingga oleh orang pertama yang mendiami disebut Tanjung Paku. Meskipun pada tahun 1800 wilayah Tanjung Paku dilanda banjir besar yang menyebabkan daratan desa tidak berbentuk semenanjung lagi, namun masyarakat tetap menyebut desanya dengan nama desa Tanjung Paku.

Garis keturunan masyarakat Tanjung Paku berasal dari etnis besar Ot Danum dalam cakupan anak etnis Dayak Pangin. Nama-nama cikal bakal orang Dayak Pangin ialah Pecak, Solowe, Kamid, dan Lantang. Mereka tinggal di daerah sungai Mahakam bersama suku-suku Dayak lain, yaitu orang Kenyah, orang Punan, orang Penyabung, dan orang Semukung. Mereka tinggal bersama dalam keharmonian, namun pada suatu masa terjadi konflik antara orang Pangin dengan orang Punan. Peristiwa tersebut berlanjut menjadi permusuhan antar kedua etnis dan menjadi perang berkepanjangan. Perang ini berlangsung lama dan diwariskan kepada anak turun etnis.

Ketika ada penyerangan besar-besaran oleh suku Serawak (Iban) terhadap suku-suku yang mendiami wilayah Kapuas Hulu, mereka menyingkir ke tepi sungai Kapuas dekat Kabupaten Sintang, kemudian pindah ke tepi sungai Lekawai, dan

berhenti di simpang sungai Melawi. Karena merasa tidak aman, mereka kembali menyingkir ke Nanga Landau Tawang di tepi sungai Ella Hilir, kecamatan Nanga Ella, kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Di sungai Ella Hilir inilah orang Pangin merasa aman dan tidak ada lagi musuh yang mengejar, akhirnya mereka membangun perkampungan di wilayah yang disebut Tanjung Paku. Wilayah Tanjung Paku mencakup hutan Seruyan Hulu yang terkenal melimpah sumber daya hutannya. Pada akhirnya desa Tanjung Paku menjadi wilayah yang terkenal terutama disebabkan kesuburan tanah dan hasil kekayaan alam yang berlimpah.

Aspek Administrasi Pemerintahan

Desa Tanjung Paku secara administratif berada di wilayah kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Letak Desa Tanjung Paku berada di ujung utara bagian barat wilayah Kalimantan Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Tepatnya desa Tanjung Paku berada di hulu sungai Seruyan yang bermuara di Kuala Pembuang, Laut Jawa.

Secara geografis desa Tanjung Paku terletak di antara titik ordinat $111^{\circ}25'$ bujur timur dan $00^{\circ}25'-01^{\circ}10'$ lintang selatan. Jika dilihat secara administrasi kehutanan, wilayah desa Tanjung Paku termasuk dalam kelompok hutan sungai Seruyan Hulu, Kesatuan Pemangkuan Hutan Sampit dan Kesatuan Pemangkuan Hutan Seruyan, Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Berdasarkan pembagian areal konsesi usaha hutan, maka desa Tanjung Paku terletak berdampingan dengan areal perusahaan pemegang konsesi perusahaan konsesi hutan unit Seruyan.

Desa Tanjung Paku terletak di ketinggian wilayah antara 500-1000 meter di atas permukaan laut dengan daratan berupa daratan lembah bukit bertopografi landai. Bukit-bukit hijau yang mengelilingi desa Tanjung Paku dalam rentetan pegunungan Schwander Muller memberi suasana asri. Berdasar peta tanah eksplorasi Kalimantan, jenis tanah di areal kelompok hutan sungai Seruyan Hulu pada bagian utara didominasi oleh jenis tanah podsolik merah kuning, batuan induk beku, dan fisografi intrusi.

Wilayah perkampungan Tanjung Paku menempati daratan tanah seluas 1,5 hektar yang di sekelilingnya terdapat banyak bukit, yaitu bukit Itab, bukit Mentawak, bukit Liang Janan, bukit Beruang, bukit Kijang, bukit Bungur, bukit Tabun, bukit Pondung Bosurang, bukit Eray, dan bukit Rengka. Kecuali bukit Eray dan bukit Rengka, oleh pemerintah ditetapkan sebagai bukit lindung.

Aspek Sarana Prasarana

Tanjung Paku sebagai satu pemukiman pastilah memiliki sarana prasarana guna memperlancar mekanisme kerja bermasyarakat. Terdapat lima sarana prasarana penting yang ada di desa Tanjung Paku. Kelima sarana prasarana yang tersedia tersebut antara lain meliputi sarana transportasi, sarana air bersih, sarana penerangan, sarana tempat ibadah, dan sarana informasi.

Masyarakat Tanjung Paku sebelum adanya perusahaan pemegang konsesi pengusahaan hutan mengandalkan jasa transportasi dari arus sungai Seruyan untuk menuju Tumbang Manjul (ibukota Kecamatan Seruyan Hulu) dan memakai sungai Ella untuk perjalanan ke Kecamatan Nanga Ella dan Kecamatan Nanga Pinoh. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas angkutan transportasi yang disediakan oleh perusahaan pemegang konsesi, maka masyarakat desa Tanjung Paku menjadi semakin mudah dan terbantu untuk menjangkau daerah-daerah di sekitarnya dengan waktu yang relatif lebih cepat. Fasilitas angkutan transportasi yang disediakan perusahaan berdampak pada meningkatnya pendapatan ekonomi dan mobilitas masyarakat Tanjung Paku.

Kebutuhan air bagi masyarakat Tanjung Paku selain ditopang oleh air sungai Seruyan, mereka juga memanfaatkan instalasi air bersih yang dibangun atas hasil kerjasama antara perusahaan pemegang konsesi pengusahaan hutan dan masyarakat pada tahun 1994. Selaras dengan perjalanan waktu, ternyata instalasi air bersih tersebut kurang terpelihara sehingga fungsinya menjadi terganggu. Masyarakat lebih memilih mengambil air di sungai yang tersedia melimpah di samping rumahnya. Mereka memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air minum, mandi, mencuci, dan buang hajat.

Sarana penerangan masyarakat Tanjung Paku dahulu menggunakan pelita dengan bahan bakar getah damar yang diambil dari hutan adat Bukit Beruang. Getah damar diperoleh melalui cara mengambil getah yang menempel pada batang pohon damar kemudian ditumbuk dan diambil airnya. Peran getah damar mulai tergantikan, ketika masuknya perusahaan pemegang konsesi pengusahaan hutan alam di Tanjung Paku yang mengenalkan bahan bakar solar untuk penerangan. Setiap bulannya masyarakat mendapat jatah 10 liter bahan bakar solar tiap Kepala Keluarga yang diambil bertahap tiap dua minggu sekali. Bahan bakar solar digunakan oleh masyarakat untuk penerangan pelita dan menghidupkan mesin genset. Dengan adanya genset, maka tidak mengherankan bila saat ini banyak terdapat fasilitas elektronik rumah tangga seperti televisi, VCD, tape, dan radio. Sarana informasi lain yang terdapat di desa Tanjung Paku adalah fasilitas SSB (*single side band*) yang berada di kantor *camp* bina desa Tanjung Paku. Fasilitas informasi dan komunikasi ini sangat penting untuk memantau berita lokal seputar kegiatan perusahaan dan perkembangan desa-desa sekitar perusahaan.

Kelengkapan fasilitas sembahyang berupa tempat ibadah di Tanjung Paku tersedia bagi semua umat beragama. Masyarakat Tanjung Paku yang terdiri dari bermacam penganut agama terlengkapi sarana ibadahnya berkat kerjasama yang terjalin antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Sarana ibadah yang tersedia antara lain berupa musholla, gereja, dan balai Hindu Kaharingan.

Dinamika Sosial Budaya

Interaksi yang semakin terbuka antara masyarakat Tanjung Paku dengan masyarakat luar memberi peluang terjadinya suatu dinamika sosial budaya. Masuknya karyawan perusahaan, kaum penyebar agama, dan pedagang di masyarakat Tanjung Paku berdampak terjadinya suatu akulturasi budaya. Sarana informasi

televisi dan radio yang telah dimiliki oleh sebagian warga Tanjung Paku berdampak pula pada diadopsinya nilai-nilai luar oleh masyarakat Tanjung Paku.

Berdasarkan catatan monografi desa Tanjung Paku, jumlah penduduk desa Tanjung Paku saat ini tercatat sebanyak 403 jiwa yang terbagi dalam 95 KK dengan rata-rata tiap KK berjumlah 4-5 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 198 jiwa (49%) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 205 jiwa (51%). Penduduk Tanjung Paku mayoritas berasal dari etnis Dayak Pangin (90%), selebihnya berasal dari penduduk pendatang seperti Jawa, Melayu, maupun etnis Dayak sekitar Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Mata pencarian masyarakat Tanjung Paku sebelum adanya perusahaan konsesi menggantungkan hidupnya dari potensi alam yang ada di sekitarnya. Masyarakat memenuhi kebutuhan makan dari berburu, meramu, dan menangkap ikan. Didukung oleh kesuburan tanah yang tersedia, dalam perkembangannya masyarakat Tanjung Paku kemudian mengolah tanah dengan membuka hutan dijadikan ladang. Kebutuhan padi ladang semakin bertambah, ketika mulai dikenal perdagangan dengan masyarakat luar.

Diversitas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh warga pada tahun sembilan puluhan mengalami perkembangan yang ditandai dengan masuknya program HPH Bina Desa oleh perusahaan di Tanjung Paku. Program yang kemudian berganti nama menjadi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang disosialisasikan kepada warga Tanjung Paku, antara lain pertanian sawah, perkebunan, perikanan, dan peternakan; yang kesemuanya dikerjakan secara intensif.

Kompleksitas mata pencarian warga Tanjung Paku seiring masuknya perusahaan ternyata masih bertambah, hal ini ditandai dengan terserapnya tenaga kerja masyarakat ke perusahaan. Warga Tanjung Paku yang bekerja di perusahaan berjumlah 45 orang, yang terdiri dari petugas jam malam (13 orang), operator *chainsaw* (6 orang), karyawan bulanan (11 orang), karyawan harian (13 orang), dan guru honor PMDH (2 orang).

Dinamika perubahan yang memasuki relung sosial budaya dan ekonomi masyarakat, diyakini lambat laun akan memudahkan identitas masyarakat Tanjung Paku. Kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi dan sulit dicukupi mendorong masyarakat untuk melakukan diversifikasi aktifitas guna memperoleh uang sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup. Diversitas pekerjaan yang ada di masyarakat Tanjung Paku merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya dinamika budaya.

Potret Pertanian Sawah Desa Tanjung Paku

Pertanian sawah merupakan bentuk aktifitas kerja masyarakat Tanjung Paku yang relatif baru. Pertama kali sistem pertanian sawah dikenal oleh masyarakat pada tahun sembilan puluhan awal, bersamaan dengan dikeluarkannya SK Menhut No. 691/Kpts/1991 tentang HPH Bina Desa yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang tinggal di sekitar dan dalam hutan. Program bina desa dilakukan oleh perusahaan pemegang konsesi perusahaan hutan yang memiliki wilayah kerja berdampak dengan masyarakat desa hutan. Program ini

mempunyai 5 prioritas kerja, salah satunya mengubah pola pertanian berladang berpindah menjadi pola pertanian menetap dengan sistem pertanian sawah.

Perusahaan pemegang konsesi perusahaan hutan yang mempunyai lahan kerja berdampingan dengan masyarakat Tanjung Paku terdorong kewajiban untuk memperkenalkan pola pertanian sawah. Masyarakat Tanjung Paku menyambut antusias pengenalan program pertanian sawah. Fenomena ini sangat menarik, sebab sistem pertanian sawah adalah pola pertanian baru yang memiliki latar belakang budaya berbeda dengan budaya masyarakat Tanjung Paku.

Sejarah dan Asal-usul

Secara historis kultural, masyarakat Tanjung Paku pertama kali mengenal kegiatan pertanian sawah pada tahun 1991, ketika ada surat permohonan dari Kepala Desa Tanjung Paku yang diajukan kepada pihak perusahaan pemegang konsesi perusahaan hutan yang berisi keinginan masyarakat untuk melakukan program pertanian sawah menetap. Masyarakat Tanjung Paku terbuka untuk dibina dalam hal kegiatan pertanian bersawah. Mereka sangat memimpikan sistem pertanian sawah yang sering dilihat di acara televisi dan hasil cerita informasi yang didengar dari masyarakat luar. Pertanian sawah dianggap sebagai sistem pertanian yang mudah dikerjakan dan menghasilkan panen padi yang lebih banyak dibandingkan dengan usaha pertanian ladang.

Pertanian sawah tidak tergantung cuaca, sehingga selama satu tahun dapat panen 2-3 kali. Resiko kerja pertanian sawah lebih kecil, sebab tidak ada pekerjaan menebang dan membakar lahan. Hasil panen aman dari serangan hewan buas, sebab lokasinya dekat dengan kampung. Selain itu dalam masyarakat berkembang pemitosan, bahwa pertanian sawah merupakan simbol pola pertanian maju dengan tingkat peradaban masyarakat yang maju. Bercermin hal tersebut, maka masyarakat kemudian dengan semangat mendukung dan berpartisipasi mencoba kegiatan bersawah.

Faktor lain yang turut mendorong masyarakat Tanjung Paku untuk melakukan kegiatan pertanian sawah menetap adalah pertimbangan usia dan keterbatasan tenaga kerja. Pertimbangan usia menjadi alasan bagi kalangan orang tua untuk mengerjakan padi di sawah. Hal ini disebabkan pada usia menginjak tua tenaga berkurang, sehingga tidak memungkinkan lagi mengerjakan kegiatan berat di ladang. Pertanian sawah bisa menjadi alternatif pekerjaan para orang tua, sebab pertanian sawah tidak memerlukan tenaga yang berat. Faktor kedua adalah keterbatasan tenaga kerja. Banyaknya tenaga muda yang direkrut menjadi karyawan perusahaan, berakibat berkurangnya tenaga produktif untuk mengerjakan ladang. Hal ini mendorong masyarakat mengerjakan sawah yang membutuhkan tenaga kerja lebih sedikit.

Setelah persoalan pembebasan lahan selesai, maka mulailah perusahaan pemegang konsesi perusahaan hutan dan masyarakat Tanjung Paku bersama-sama mempersiapkan kegiatan royong untuk pembukaan lahan sawah. Kegiatan royong sawah dilakukan dalam pembukaan lahan sawah meliputi pekerjaan menebas, menebang, membakar, mencabut tunggul, meratakan lahan, pembuatan petak lahan, pembuatan petak percontohan, dan pembuatan saluran irigasi.

Sawah percontohan yang pertama kali dibuka seluas 0,18 Ha ternyata cukup berhasil. Bibit satu gantang padi berlipat menjadi 85 gantang. Atas dasar itu, masyarakat kemudian tertantang untuk mempraktekkan sistem pertanian sawah. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambah luasnya lahan sawah dan jumlah penduduk yang mengerjakan kegiatan sawah. Jumlah penduduk yang memiliki sawah pada tahun 1992 sebanyak 23 KK dengan luas areal sawah 0,48 Ha. Pada tahun 1994 jumlah penduduk yang memiliki sawah berjumlah 26 KK dengan luas areal sawah mencapai 4,68 Ha. Pada tahun 1998 jumlah petani sawah terus bertambah menjadi 41 KK dengan luas lahan sawah mencapai 11,4 Ha.

Tata Cara

Secara historis, masyarakat Tanjung Paku mengenal tata cara pertanian sawah dari petugas penyuluh lapangan dari perusahaan pemegang konsesi perusahaan hutan. Petugas penyuluh lapangan yang mempunyai latar belakang budaya pertanian sawah dan didukung oleh penguasaan teoritis sistem pertanian sawah sehingga mampu menciptakan suatu pertanian sawah yang berhasil. Pertanian sawah yang dikelola mampu menghasilkan panen yang optimal. Masyarakat Tanjung Paku yang minim pengetahuan tentang sistem pertanian sawah, kemudian secara empirik melihat hasil berlimpah pertanian sawah menjadi tertarik. Mulailah masyarakat belajar menyemai bibit, mengolah lahan, menanam bibit, mengatur irigasi, menyemprot, merumput, dan memanen.

Tahap awal tata cara pertanian sawah adalah menyemai bibit padi yang dilakukan di petak sawah. Bibit padi yang ditanam oleh masyarakat Tanjung Paku, antara lain jenis bibit *maros*, *way puboro*, *cisadane*, *dodokan*, *IR 64*, dan *membramo*. Bibit padi pertama kali berasal dari perusahaan pemegang konsesi perusahaan hutan alam. Hasil panen padi sawah sebagian disisihkan untuk cadangan bibit berikutnya, meskipun secara aturan pertanian kurang baik hasilnya.

Jika persemaian bibit sudah dilakukan, kemudian pemilik sawah mempersiapkan pengolahan lahan. Pekerjaan pengolahan lahan dikerjakan menggunakan cangkul untuk menggemburkan tanah. Pekerjaan pengolahan lahan sawah dilakukan dengan cara manual dengan menggunakan cangkul. Pekerjaan mencangkul dilakukan oleh para lelaki dan perempuan dengan sistem royong yang terdiri 15-20 orang. Setelah pekerjaan mengolah lahan selesai, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan menanam bibit padi.

Proses penanaman bibit padi sawah dilakukan dengan sistem royong. Kelompok royong sawah mayoritas terdiri dari perempuan, sebab ada anggapan bahwa pekerjaan sawah adalah pekerjaan ringan yang tidak sesuai dengan tenaga pria. Setelah penanaman bibit padi selesai, maka pekerjaan selanjutnya adalah pemeliharaan sampai padi panen. Adapun pekerjaan yang harus dikerjakan dalam rentangan waktu tersebut adalah mengairi, menyemprot, dan merumput.

Irigasi

Sistem irigasi sawah Tanjung Paku menggunakan sumber air dari sungai Kakai yang letaknya 500 meter di sebelah utara kampung. Sungai Kakai dibendung dan sebagian airnya dibelokkan ke lokasi sawah milik masyarakat Tanjung Paku. Pembuatan irigasi air di sawah Tanjung Paku dilakukan oleh perusahaan pemegang konsesi perusahaan hutan bekerjasama dengan masyarakat Tanjung Paku. Pengerjaan pembuatan irigasi menggunakan alat berat traktor. Masyarakat membantu menebang pohon, membersihkan tunggul, dan akar pohon yang berada di sepanjang aliran irigasi.

Pada mulanya sistem irigasi pertanian sawah di Tanjung Paku mempunyai struktur kerja yang bertugas mengurus pembagian air dan menjaga kelancaran air. Struktur kerja pertanian sawah dimasukkan ke struktur perusahaan dan mendapat upah dari perusahaan. Namun, struktur kerja tersebut dihapus setelah ada upaya pengurangan subsidi di sektor pertanian sawah. Akibatnya pembagian kerja dan pengurusan air diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Tanjung Paku. Penyerahan wewenang sepenuhnya pengelolaan irigasi kepada masyarakat, ternyata berdampak pada tidak terkelolanya sistem irigasi dengan baik sebagaimana masa sebelumnya.

Mekanisasi

Pertanian sawah di Tanjung Paku mayoritas masih dikerjakan secara manual. Pada tahun 1995 desa Tanjung Paku pernah mempunyai traktor tangan (*hand tractor*) untuk membajak lahan sawah yang berasal dari sumbangan pemerintah. Traktor tangan menjadi milik bersama warga dan digunakan untuk membajak sawah. Karena traktor tangan tidak ada yang bertanggung jawab merawat dan memelihara, maka traktor tangan cepat mengalami kerusakan. Akibatnya masyarakat kembali mengolah tanah sawah secara manual menggunakan cangkul.

Selain mekanisasi melalui traktor tangan, masyarakat Tanjung Paku juga telah mengenal mesin penggiling padi (*rice mill*). Masyarakat Tanjung Paku yang memiliki mesin penggiling padi ada tiga orang. Mesin penggiling padi sangat membantu pekerjaan kaum perempuan di Tanjung Paku, sebab sebelumnya penggilingan padi dilakukan dengan menumbuk padi memakai alat lesung. Sistem pembayaran penggilingan padi menggunakan sistem barter, yaitu setiap 10 gantang padi maka pemilik padi harus membayar 1 gantang padi. Mesin penggiling padi merupakan barang modern yang telah dimanfaatkan masyarakat Tanjung Paku secara arif.

Rotasi

Penanaman padi sawah di Tanjung Paku dilakukan dua kali selama satu tahun, yaitu pada tahun besar dan tahun kecil. Tahun besar dimulai pada akhir bulan Oktober sampai akhir bulan Februari. Penyiapan lahan tahun besar dilakukan pada akhir bulan November dan diperkirakan panen pada akhir bulan Februari. Sedangkan pada tahun kecil, penyiapan lahan dilakukan pada awal bulan Mei.

Penanaman bibit padi pada awal bulan Juni dan diperkirakan panen pada awal bulan September.

Rotasi pertanian sawah yang membagi tahun besar dengan tahun kecil berdampak perbedaan jumlah hasil padi sawah yang diperoleh. Pada tahun besar padi sawah hasilnya lebih banyak, sekitar 400 gantang tiap petaknya. Berbeda pada tahun kecil yang hanya mampu menghasilkan padi sawah sekitar 100 gantang. Pada tahun kecil, pekerjaan ladang sangatlah padat sehingga tanaman padi sawah kurang terawat dan akibatnya hasil panen menjadi kurang optimal.

Organisasi Kerja

Pekerjaan sawah di Tanjung Paku dilaksanakan menggunakan sistem royong, layaknya pekerjaan ladang. Kegiatan royong sawah dilakukan dalam kegiatan mengolah lahan, menanam, dan memanen. Kegiatan menyemai bibit dilakukan oleh masing-masing pemilik lahan. Apabila tidak ada kegiatan royong di ladang, maka masyarakat Tanjung Paku yang mempunyai sawah pagi-pagi sudah pergi ke sawah. Para pemilik sawah mengecek tanaman padi sawahnya. Apabila ada kegiatan royong sawah, maka tepat pukul 8 pagi mereka berangkat ke sawah dan langsung menuju pondok sawah dimana akan dilakukan royong. Royong merupakan media tukar informasi antar anggota royong sekaligus arena rekreatif bagi warga.

Tidak ada acara makan dan ritual adat dalam kegiatan royong sawah sehingga berdampak pada penghematan biaya yang dikeluarkan. Berbeda dengan kegiatan royong ladang, kegiatan royong sawah tidak menggunakan acara ritual adat karena pertanian sawah dianggap bukan berasal dari daerah setempat. Pertanian sawah adalah budaya Jawa yang dibawa masuk ke masyarakat Tanjung Paku, sehingga secara historis tidak ada hubungan dengan adat setempat. Namun dari pembicaraan para tokoh adat, pertanian sawah identik dengan pertanian lahan basah dan air. *Gana-gana* (roh mahluk halus) takut dengan air, sehingga tidak perlu diadakan upacara adat.

Jenis Tanaman dan Hama Penyakit

Sistem pertanian sawah identik dengan istilah sistem pertanian monokultur, yaitu tanaman padi. Padi menjadi tanaman utama dalam sistem pertanian sawah. Jenis tanaman padi sawah yang ditanam di Tanjung Paku semua bibitnya berasal dari transfer program perusahaan pemegang konsesi perusahaan hutan. Masyarakat menggunakan bibit padi sawah dari hasil panen sebelumnya, sehingga hasil padi sawah cenderung mengalami penurunan karena terjadi penurunan kualitas bibitnya. Masuknya berbagai macam jenis padi transgenik yang ditanam di sawah, berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap bibit tersebut.

Sistem pertanian sawah yang membutuhkan perawatan intensif di Tanjung Paku belum dilaksanakan secara benar. Hal ini terbukti dari banyaknya hama penyakit yang menyerang tanaman padi sawah. Adapun jenis hama penyakit yang menyerang tanaman padi sawah di Tanjung Paku, antara lain wereng, walang sangit, belalang, ulat, penggerek, keong, tikus, burung pipit, babi, ayam, dan sapi. Serangan

hama tanaman padi yang saat ini paling dikeluhkan masyarakat Tanjung Paku adalah hama babi dan sapi. Kedua hewan ternak ini bisa menghabiskan satu petak sawah dalam satu malam. Selain itu hama tanaman padi sawah yang juga merugikan petani adalah tikus dan burung pipit. Kedua hewan ini menyerang dari dua arah yang berbeda, tikus dari bawah dan burung pipit dari atas.

Modal

Modal pertanian sawah di Tanjung Paku berasal dari dua sumber, yaitu dari masing-masing pemilik sawah dan bantuan perusahaan. Modal yang berasal dari masing-masing pemilik sawah, antara lain penyediaan bibit dan tenaga kerja. Penyediaan bibit tanaman padi sawah berasal dari hasil panen bibit sebelumnya, meskipun pada awalnya dari bantuan perusahaan. Namun sehubungan bantuan bibit padi yang terhenti, maka pemilik sawah menggunakan bibit dari hasil panen sebelumnya. Sedangkan untuk kebutuhan tenaga kerja, dapat dihitung dari jumlah kegiatan royong yang dilakukan. Untuk pertanian sawah, kegiatan royong dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pada waktu pengolahan lahan, penanaman, dan pemanenan. Kewajiban seorang pemilik sawah yang telah melaksanakan royong adalah membalas sejumlah tenaga yang ikut royong.

Modal pertanian sawah tidak sepenuhnya dari masyarakat pemilik sawah, namun ada sebagian modal yang berasal dari perusahaan pemegang konsesi perusahaan hutan yang memiliki wilayah kerja berdampingan dengan masyarakat. Adapun modal yang berasal dari bantuan perusahaan, antara lain penyediaan pupuk, pestisida, dan peralatan kerja. Penyediaan pupuk oleh perusahaan meliputi urea, SP-36, KCl, dan dolomit. Penyediaan pestisida meliputi supraside, spontan, matador, klerat RMB, dharmobes, dhitone, dan regent 50 SC. Sedangkan bantuan dari perusahaan untuk peralatan meliputi handsprayer, cangkul, gembor, meteran, tali rafia, dan batu canai.

Hasil dan Pemasaran

Pertanian sawah di Tanjung Paku menghasilkan panen sebanyak dua kali dalam satu tahun. Panen tahun kecil terjadi pada bulan Agustus dan tahun besar pada bulan Februari. Hasil tahun kecil lebih sedikit dibandingkan dengan panen tahun besar yang disebabkan perbedaan perawatan. Pada tahun kecil perawatan tanaman padi tidak dapat dilakukan secara intensif, sebab waktu perawatan tanaman padi sawah bersamaan dengan kegiatan menebas, menebang, membakar, dan menanam. Jumlah panen padi sawah pada tahun kecil berkisar 100 gantang, sedangkan pada tahun besar dapat mencapai 300 gantang.

Hasil panen padi jika dihitung secara matematis, maka diperoleh perhitungan hasil biaya pengeluaran tidak seimbang dengan hasil yang didapat. Pada tahun kecil dengan produksi 100 gantang padi, maka diperoleh uang sebesar Rp 300.000,00. Padahal untuk penyediaan bibit, biaya royong, dan upah tenaga dikeluarkan biaya sebesar Rp 588.000,00. Sementara pada musim tanam sawah tahun besar, seorang petani dapat meraup untung. Dengan hasil 300 gantang maka dapat diuangkan

sekitar Rp 900.000,00 sehingga setelah dikurangi biaya produksi maka keuntungan seorang petani adalah sebesar Rp 322.000,00. Hasil tanaman padi di Tanjung Paku digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan subsisten keluarga. Masyarakat belum mengenal konsep perdagangan beras. Pemasaran padi sawah hanya terbatas pada lingkungan warga kampung, itu pun dikerjakan dengan sistem barter.

Pertanian sawah di Tanjung Paku tidak terbatas pada hasil padi, namun hasil sayuran dan kacang-kacangan menjadi salah satu komoditas yang diusahakan oleh masyarakat. Adapun komoditas sayuran dan kacang-kacangan yang dihasilkan oleh masyarakat, antara lain kangkung, sawi keriting, sawi putih, sawi hijau, kacang panjang, kacang tanah, kedelai, terong, bayam, buncis, mentimun, dan jagung manis. Sayuran dan kacang-kacangan ditanam oleh masyarakat di kebun sayur dan di sawah pada musim bera. Hasil sayuran dan kacang-kacangan dijual ke komunitas *camp* perusahaan, selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan non pangan, seperti pendidikan, kesehatan, pakaian, dan hiburan.

Intensifikasi Pertanian Sawah: Solusi atau Tragedi ?

Pertanian menetap dengan sistem pertanian sawah merupakan salah satu konsep yang menjadi pemecah kebuntuan pemerintah terhadap tuntutan upaya peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan yang terpencar di sekitar dan dalam hutan. Konsep tersebut diaktualisasikan dalam sebuah misi yang bertekad mewujudkan swasembada pangan. Padahal jika dicermati, sistem dan pola budaya bertani sawah membutuhkan modal yang cukup banyak baik untuk biaya pembelian bibit, pupuk, dan obat-obatan serta memerlukan proses pengadopsian sebagai suatu budaya baru bagi masyarakat sekitar kawasan hutan sehingga mereka membutuhkan waktu belajar yang cukup panjang.

Program pertanian sawah patut menjadi perenungan bersama, apakah kebijakan pemerintah atas optimalisasi sistem pertanian sawah yang diterapkan dalam suatu masyarakat sudah melalui jalan penggodakan yang panjang, sehingga suatu masyarakat betul-betul siap untuk mempraktekkan sistem pertanian sawah. Jika suatu masyarakat betul-betul sudah siap tentunya keberhasilanlah yang akan dicapai, namun jika itu kebalikannya tentunya marginalisasi masyarakatlah yang akan terjadi. Bentuk marginalisasi masyarakat atas optimalisasi pertanian sawah, antara lain (1) lenyapnya biodiversitas, (2) kerawanan pangan, dan (3) ketergantungan yang semakin meningkat (Nugraha, 2005).

Lenyapnya Biodiversitas

Seiring masuknya sistem pertanian sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Kalimantan secara monokultur yang memerlukan pasokan pupuk dalam jumlah besar sehingga tidak bergantung pada proses pendauran mineral alam serta memerlukan zat-zat kimia untuk menekan persaingan dari tumbuhan dan binatang lain berakibat lenyapnya keragaman hayati di daerah Kalimantan (Mackinnon, 1997). Masyarakat Kalimantan yang masih menerapkan praktek perladangan berpindah rata-rata

mengenal lebih dari 17 macam jenis padi. Mereka menabur benih padi sesuai keinginan mereka, apakah yang cepat masak, enak rasanya, ataukah jadi barang dagangan (Widjono, 1998).

Kearifan lokal masyarakat untuk menyelamatkan diversitas tanaman ladang, khususnya jenis-jenis tanaman padi mulai mengalami pergeseran, tatkala di desa Tanjung Paku diperkenalkan sistem pertanian sawah menetap oleh perusahaan pemegang konsesi perusahaan hutan yang mempunyai areal kerja berdampingan dengan masyarakat. Ketertarikan masyarakat Tanjung Paku mengerjakan sistem pertanian sawah berujung pada terhapusnya sistem perladangan yang berarti lenyapnya diversitas padi lokal. Bibit unggul transgenik untuk pertanian padi sawah seperti *maros*, *way puboro*, *cisadane*, *dodokan*, *IR 64*, dan *membramo* telah dihafal oleh masyarakat (Widayanti dan Krishnayani, 2000).

Kerawanan Pangan

Lumbung padi yang ada di Tanjung Paku secara fungsional kurang mampu menopang ketahanan pangan masyarakat. Terbukti dari jumlah tampungan lumbung padi atau *barai* yang terus berkurang kapasitasnya. Pada tahun 70an, setiap KK mempunyai persediaan padi untuk kebutuhan makan selama 12 tahun. Namun saat ini persediaan padi untuk masing-masing KK rata-rata 1-3 tahun. Bahkan ada sebagian warga yang tidak mempunyai cadangan beras sama sekali. Mereka menggantungkan jatah beras dari perusahaan atau membeli di kantin perusahaan.

Makin menurunnya cadangan beras masyarakat didasarkan oleh semakin rendahnya produktifitas panen padi dan jenis padi yang tidak tahan lama. Rendahnya produktifitas padi disebabkan oleh munculnya diversifikasi pekerjaan, menyempitnya areal perladangan, dan serangan hama penyakit. Jenis padi yang tidak tahan lama dikenal oleh masyarakat, sejak masuknya bibit unggul transgenik di Tanjung Paku. Padi yang berasal dari bibit unggul transgenik jika disimpan lebih dari 3 tahun akan berubah warna menjadi kuning dan tidak enak lagi dimakan. Padi dari bibit unggul transgenik oleh masyarakat setiap panen langsung diolah untuk keperluan makan. Akibatnya lumbung padi atau *barai* setiap tahun jarang terisi penuh, sebab hasil panen padi untuk memenuhi kebutuhan sekarang. Kerawanan pangan menghantui masyarakat Tanjung Paku dan sewaktu-waktu dapat menampakkan wujudnya.

Ketergantungan yang Semakin Meningkat

Secara umum, dewasa ini telah terjadi peningkatan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pihak perusahaan. Baik ketergantungan langsung dalam bentuk interaksi mata pencarian sebagai karyawan perusahaan maupun ketergantungan tidak langsung dalam perspektif pemanfaatan berbagai fasilitas maupun interaksi sosial, ekonomi dan budaya. Setidaknya terdapat 12 aspek yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menunjukkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pihak perusahaan, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, pendidikan, kesehatan,

penerangan, transportasi, komunikasi, pemerintahan, perumahan, sarana umum, dan infrastruktur jalan.

Masyarakat Tanjung Paku mengalami ketergantungan yang relatif tinggi terhadap perusahaan, Bahkan, fenomena yang timbul dari hari ke hari adalah terjadinya peningkatan ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan. Konsekuensi kondisional tersebut tentu saja sangat memprihatinkan karena akan mengakibatkan bencana seandainya karena satu dan lain hal perusahaan tidak lagi beroperasi di sekitar kawasan desa tersebut. Ketergantungan masyarakat atas perusahaan, lambat laun akan menjadi sebuah persoalan besar bila tingkat kemandirian sejati yang semula dimiliki tidak cepat diwujudkan kembali.

Penutup

Kegagalan pembangunan kehutanan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa hutan pada beberapa dekade terakhir ini telah menimbulkan krisis kepercayaan (*distrust*) di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi sebuah keniscayaan bagi siapapun yang duduk di pemerintahan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat desa hutan atas konsep pembangunan kehutanan ke depan agar benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Konsep pembangunan kehutanan ke depan harus mampu menghidupkan kembali (revitalisasi) institusi lokal yang berakar pada sistem dan tata nilai budaya masyarakat setempat dengan landasan utama adanya rasa saling percaya (*trust*). Institusi lokal yang demikian jelas akan mencerminkan realitas sosial, ekonomi, budaya dan religiusitas masyarakat setempat. Selain itu diperlukan adanya kesejajaran di antara semua kelompok masyarakat yang teraktualisasi dalam bingkai demokratisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Dalam konteks tersebut, terdapat empat hal yang perlu diperhatikan yaitu (1) relativitas budaya dimana keberagaman merupakan sebuah keniscayaan, (2) perencanaan dari bawah, (3) pelibatan masyarakat dalam setiap aspek dan tahapan pembangunan, dan (4) upaya pemberdayaan masyarakat. Semoga dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Indonesia, sasaran dan target tersebut dapat semakin mudah tercapai.

Daftar Pustaka

- Budiman, Arief. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Mackinnon, Kathy. *Ekologi Kalimantan*. Jakarta: Prenhallindo, 1997.
- Nugraha, Agung. *Menyongsong Perubahan Menuju Revitalisasi Sektor Kehutanan*. Serpong: Wana Aksara, 2004.
- Nugraha, Agung. *Rindu Ladang: Perspektif Perubahan Masyarakat Desa Hutan*. Serpong: Wana Aksara, 2005.
- Widayanti dan Krishnayanti. *Bioteknologi: Solusi atau Polusi*. Jakarta: Konphalindo, 2000.
- Widjono, R.H. *Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok*. Jakarta: Grasindo, 1998.

*) Staf Pengajar Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat,
Fakultas Ekologi Manusia – IPB Bogor
Telp. (0251) 8340254/HP 081311157644
E-mail : pudji1962@yahoo.co.id